

UPAYA MACCIH (*THE MISSION TO SUPPORT THE FIGHTS AGAINST CORRUPTION AND IMPUNITY IN HONDURAS*) DALAM MENANGANI KORUPSI DAN IMPUNITAS DI HONDURAS

Achmad Dery Nomara Putra¹

Abstract

Honduras is one of the poorest countries with a high level of economic inequality in Latin America. Not only poverty, history states that Honduras has long had problems in terms of corruption. The corruption that has spread then creates a problem that extends to other sectors. Then the president of Honduras, Juan Orlando Hernandez asked external parties i.e. OAS to overcome corruption and impunity in his country. Later, the purpose of this study was to know the efforts of MACCIH in dealing with corruption and impunity in Honduras in 2016-2018.

Keywords: Honduras, MACCIH, OAS.

Pendahuluan

Honduras merupakan negara yang terletak di Amerika Tengah dan menjadi salah satu negara termiskin di Amerika Latin. Lebih dari separuh penduduk atau sekitar 53% rakyat Honduras hidup di bawah garis kemiskinan sedangkan 24% rakyat Honduras bahkan hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim (insightcrime.org, 2018). Menurut laporan, Honduras tidak hanya mengalami kemiskinan namun Honduras juga diketahui memiliki sejarah yang panjang dalam hal korupsi, perdagangan narkoba dan kasus kekerasan serta pembunuhan yang terorganisir (insightcrime.org, 2018).

Faktor sejarah memberikan pengaruh besar bagi para pelaku ekonomi politik yang saat ini bertidak korupsi di Honduras. Para elit tersebut merupakan imigran dari Eropa Timur dan Timur Tengah, mereka menggunakan ikatan bisnis internasional dan juga korupsi untuk memajukan kepentingan ekonomi mereka. Maka dengan kata lain dapat dipahami bahwa korupsi yang terjadi di Honduras bukan hanya disebabkan oleh penyimpangan aktor individu, tetapi karena penyimpangan yang dilakukan oleh sistem lembaga dimana tindakan korupsi tersebut hanya memiliki keuntungan dan manfaat bagi lingkaran elit.

Dampaknya saat ini korupsi telah menyebar pada hampir seluruh instansi dan lembaga diantaranya adalah lembaga peradilan, kepolisian, pelayanan publik, berbagai administrasi publik dan masyarakat sipil. Banyaknya kasus korupsi besar yang merugikan negara menyebabkan munculnya permasalahan yang meluas kepada sektor lain salah satunya adalah impunitas.

Setelah melihat kasus korupsi dan kekebalan hukum yang terjadi di Honduras, sebagai tanggapannya sekitar 8.000 pengunjuk rasa melakukan aksi protes anti korupsi dan impunitas pada awal tahun 2016. Hal ini mereka lakukan setelah mencuatnya kasus korupsi oleh presiden Honduras, Juan Orlando Hernandez dengan mencairkan dana sebesar 300 juta USD dari lembaga jaminan sosial Honduras untuk dana kampanyenya. Aktivis mengatakan dampak dari korupsi tersebut adalah lebih dari 3.000 pasien telah

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nomaraputra@gmail.com

meninggal karena rumah sakit tidak mampu menangani disebabkan kekurangan dana operasional.

Dalam upaya untuk meredakan ketegangan, Hernández mendorong pembentukan Misi Dukungan Melawan Korupsi dan Impunitas di Honduras (Misión de Apoyo contra Corrupción y la Impunidad en Honduras - MACCIH) oleh *Organization of American States* atau OAS. Pembentukan misi ini berdasarkan permintaan dari pemerintah Honduras yaitu Juan Orlando Hernández sebagai presiden kepada Sekretariat Jenderal OAS untuk memfasilitasi proses dialog nasional dalam membangun mekanisme dalam memerangi korupsi dan kekebalan hukum dalam negeri (www.oas.org, 2018). Misi tersebut telah ditandatangani pada 19 Januari 2016 antara Sekretariat Jenderal dan Perjanjian Pemerintah Honduras di markas besar OAS dalam sebuah pertemuan di Majelis Umum PBB.

Melalui MACCIH, tujuan Honduras bekerjasama dengan OAS adalah untuk meningkatkan kualitas layanan sistem peradilan Honduras dalam pencegahan dan memerangi korupsi dan impunitas, melakukan kerjasama yang aktif dalam mengawasi institusi Negara yang bertanggung jawab dan untuk mencegah, menginvestigasi, dan menghukum tindakan korupsi, meningkatkan pengawasan masyarakat sipil terhadap sistem peradilan pidana, mengawasi pelaksanaan reformasi sektor pengadilan.

Kerangka Dasar dan Teori Konsep Teori Organisasi Internasional

Organisasi Internasional menurut T. May Rudy didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar Negara yang berbeda. (Rudy, 2005)

Berdasarkan pengertian diatas, Teuku May Rudy secara tidak langsung membagi organisasi internasional ke dalam dua pembagian besar, yakni organisasi internasional pemerintah atau *International Government Organization* (IGO) dan organisasi internasional non-pemerintah atau *International Non-Governmental Organization* (INGO).

Adapun perbedaan antara IGO dan INGO adalah terletak pada keanggotaannya. Dimana anggota dari IGO adalah Negara-negara maupun pemerintah Negara. Sementara untuk INGO beranggotakan individu atau asosiasi tertentu yang kemudian bersama-sama membentuk organisasi atas dasar kepedulian akan nilai-nilai sosial atau kemanusiaan. Dengan demikian berdasarkan pada bentuk organisasi internasional, *Organization of American States* (OAS) termasuk pada organisasi internasional antar pemerintah (IGO) dengan beranggotakan 35 negara bagian Amerika dan membentuk forum politik, yuridis, dan sosial.

Kemudian, organisasi internasional dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuannya, yaitu organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum, organisasi yang keanggotaannya umum tetapi tujuannya terbatas, organisasi yang keanggotaannya terbatas tetapi tujuannya umum dan organisasi yang keanggotaan dan tujuannya terbatas.

Sedangkan fungsi Organisasi Internasional menurut T. May Rudy adalah tempat berhimpun bagi Negara – Negara anggota untuk menyusun atau merumuskan agenda

bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian – perjanjian Internasional, untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma atau rejim – rejim Internasional, penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan ada kalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota bisa dengan negara lain yang bukan Negara anggota dan bisa dengan Organisasi Internasional lainnya, penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota. (Rudy, 2005)

Menurut Clive Archer, peranan organisasi internasional dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya. Kemudian sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang di hadapi. Tidak jarang organisasi internasional di gunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional. (Rudy, 2009)

Berdasarkan peranannya *Organization of American States* (OAS) termasuk pada organisasi sebagai instrumen karena OAS digunakan oleh salah satu anggotanya yakni Honduras untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan dalam negeri Honduras.

Teori *Extra Ordinary Crime*

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*). (Mulyadi, 2013)

Menurut Eddy O.S. Hiariej, setidaknya terdapat empat sifat dan karakteristik tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) sebagai berikut:

1. Korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis;
2. Korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya;
3. Korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan;
4. Korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Eddy O.S Hiariej, 2012)

Karakteristik tersebut yang membedakan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana yang lain, sehingga bukan hanya sifat tindak pidana tersebut yang mendapat predikat *extra ordinary crime*, namun dalam penanggulangannya dibutuhkan tindakan-tindakan yang bersifat luar biasa pula.

Menurut Indriyanto Seno Adji, korupsi sebagai kejahatan luar biasa merupakan bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya. Korupsi tumbuh subur sejalan dengan kekuasaan ekonomi, hukum dan politik. Korupsi sudah menjadi bagian dari sistem yang ada, karenanya dibutuhkan usaha yang maksimal bagi penegakan hukum, khususnya lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi. Dibutuhkan pendekatan sistem atau *systemic approach*, terutama bila pendekatan sistem ini dikaitkan dengan peranan institusi peradilan yang sangat menentukan sebagai salah satu institusi penegakan hukum dalam proses akhir pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendekatan sistem dibutuhkan karena korupsi tidak saja menyerang badan eksekutif dan legislatif,

melainkan juga menyeruak pada kalangan yudikatif yang dilakukan oleh hakim, kejaksaan dan kepolisian sebagai institusi penegak hukum. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah metode penegakan hukum secara luar biasa untuk memberantas korupsi. (Adji, 2014)

Pendapat Indriyanto Seno Adji mengenai korupsi sebagai kejahatan luar biasa sejalan dengan cara yang dilakukan oleh MACCIH melalui OAS. Dalam laman resmi milik OAS, organisasi tersebut menyatakan bahwa cara yang akan mereka tempuh untuk memberantas korupsi di Honduras adalah dengan memilih, memberi saran, menilai, dan mengesahkan kelompok jaksa dan hakim Honduras yang akan melakukan investigasi dan menuntut kasus-kasus yang melibatkan jaringan-jaringan korupsi sebagai bentuk dari pendekatan terhadap sistem.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif atau *Case Study* untuk menggambarkan bagaimana upaya MACCIH (*The Mission to Support The Fights Against Corruption and Impunity in Honduras*) dalam menangani korupsi dan impunitas di Honduras. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, data ini untuk mendukung penulis pada penelitian melalui buku-buku pustaka, file yang didownload di internet dan berupa dokumentasi. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif yaitu berupa analisa upaya yang dilakukan oleh MACCIH dalam menangani korupsi dan impunitas di Honduras.. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data teori dan konsep dari perpustakaan berupa buku-buku ilmiah, buku-buku referensi dan dokumen yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian ini. Kemudian digunakan pula sebagai landasan pemikiran dan pembahasan.

Hasil Penelitian

Honduras merupakan sebuah negara di Amerika Tengah yang meraih kemerdekaan pada tahun 1838. Honduras berbatasan dengan Guatemala pada bagian barat, El Salvador barat daya dan bagian tenggara dengan Nikaragua. Dibandingkan dengan negara tetangganya Honduras merupakan negara termiskin di Amerika Latin dan memiliki tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Lebih dari setengah populasi hidup dalam kemiskinan dan menempati pendapatan per kapita terendah di kawasan tersebut.

Honduras masuk pada kategori sebagai negara berpenghasilan rendah menurut data yang dirilis oleh *The World Bank*. Penghasilan per kapita negara itu sekitar 600 USD per tahun. Pada tahun 2010, 50% populasi Honduras masih hidup di bawah garis kemiskinan. Tahun 2016, lebih dari 66% hidup di bawah garis kemiskinan. Diperkirakan sebanyak 27,9%, pengangguran atau sama dengan lebih dari 1,2 juta orang Honduras. (Insight Crime, 2018)

Kemiskinan yang menjadi salah satu permasalahan utama bagi Honduras semakin rentan terhadap korupsi dan kejahatan yang terorganisir pada tahun 1970 hingga 1990-an saat terjadi perang saudara antara negara-negara tetangganya yakni Guatemala, Nikaragua dan El Salvador. Korupsi menjadi hambatan utama bagi para investor di Honduras dan semakin memperburuk daya saing pasar. Semua sektor ekonomi menderita karena korupsi yang begitu merajalela.

Korupsi yang terjadi telah membuat sistem pendidikan bobrok, tingkat kejahatan yang tinggi dengan pembunuhan mengakibatkan 20 korban perhari, sistem kesehatan

yang buruk bahwa rumah sakit tidak pernah memiliki cukup obat-obatan dan peralatan medis yang memadai, administrasi pemerintah yang buruk dan fakta bahwa banyak pegawai negeri hampir tidak pernah dibayar tepat waktu dan secara penuh.

Organization of American States (OAS)

OAS adalah organisasi regional tertua di dunia, yang berasal dari Konferensi Internasional Pertama Negara-negara Amerika, yang diadakan di Washington, DC dari Oktober 1889 hingga April 1890. Pertemuan itu menyetujui pembentukan Uni Internasional Republik Amerika yang kemudian dikenal sebagai sistem antar-Amerika, sistem kelembagaan internasional tertua. (www.oas.org)

Setelah meratifikasi piagam OAS dan menyatukan 35 negara anggota, OAS memiliki struktur kepengurusan sebagai berikut:

1. Majelis Umum;
2. Rapat Konsultasi Menteri Luar Negeri;
3. Dewan Tetap dan Inter-American Council untuk Pembangunan Integral;
4. Komite Yuridis Antar-Amerika;
5. Komisi Antar-Amerika tentang Hak Asasi Manusia;
6. Sekretariat Jenderal;
7. Konferensi Khusus;
8. Organisasi khusus; dan
9. Entitas lain yang dibentuk oleh Majelis Umum.

Majelis Umum adalah organ tertinggi dari OAS dan terdiri dari delegasi semua negara anggota. Semua negara anggota diwakili di Majelis Umum dan memiliki hak untuk satu suara. Sedangkan Dewan Tetap hadir untuk hal-hal yang dipercayakan kepadanya oleh Majelis Umum atau Rapat Konsultasi Menteri Luar Negeri; memantau pemeliharaan hubungan persahabatan di antara negara-negara anggota dan kepatuhan terhadap standar yang mengatur operasi Sekretariat Jenderal; dan bertindak sementara sebagai Organ Konsultasi di bawah Perjanjian Rio.

OAS menggunakan empat cabang pendekatan agar secara efektif dapat melaksanakan tujuan-tujuan dasarnya. Keempat pendekatan tersebut adalah demokrasi, hak asasi manusia, keamanan, dan pembangunan.

Agar tujuan tersebut dapat terlaksana, OAS menggunakan empat cabang pendekatan yaitu demokrasi, hak asasi manusia, keamanan, dan pembangunan yang mana saling mendukung dan terjalin melalui dialog politik, inklusivitas, kerjasama, instrumen hukum dan mekanisme tindak lanjut. Berikut merupakan penjelasan lebih detail mengenai instrumen khusus yang digunakan dan tersedia bagi seluruh anggota OAS demi tercapainya tujuan masing-masing (www.oas.org)

Mission to Support the Fights Against Corruption and Impunity in Honduras (MACCIH)

Mission to Support the Fights Against Corruption and Impunity in Honduras (MACCIH) adalah sebuah misi yang dibuat dibuat OAS untuk mendukung Honduras dalam perang melawan korupsi dan impunitas dari visi yang komprehensif. MACCIH tidak hanya bekerja pada penyelidikan kasus yang relevan yang melibatkan jaringan korupsi publik dan swasta, tetapi upaya MACCIH difokuskan pada reformasi dan penguatan kerangka kerja kelembagaan untuk mencegah momok yang merusak kredibilitas otoritas dan sistem politik Honduras.

Terdapat beberapa tujuan dari misi yang diluncurkan oleh OAS ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mendukung kepatuhan Negara Honduras dengan komitmen internasional yang diperolehnya, melalui Konvensi Antar-Amerika Menentang Korupsi dan MESICIC, Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban Manusia dan Konvensi PBB menentang Korupsi (UNCAC);
2. Mendukung, memperkuat dan secara aktif berkolaborasi dengan lembaga-lembaga Negara Honduras yang bertanggung jawab untuk mencegah, menyelidiki dan menghukum tindakan korupsi
3. Berkontribusi untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga Negara yang bekerja di bidang ini;
4. Mengusulkan reformasi Pemerintah ke Sistem Peradilan Honduras, termasuk undang-undang untuk memperkuat perang melawan korupsi di dan dari sektor swasta; dan
5. Berkontribusi pada penguatan mekanisme pertanggungjawaban badan-badan peradilan Negara vis-à-vis masyarakat Honduras, serta mekanisme observasi dan pemantauan sistem peradilan dari masyarakat sipil. (oas.org, 2018)

Dalam upayanya memberantas korupsi Honduras, MACCIH melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. MACCIH akan memperkuat sektor keadilan, meningkatkan pengawasan masyarakat sipil terhadap sistem peradilan pidana, dan mengawasi pelaksanaan reformasi sektor pengadilan. Bersama-sama, tindakan ini akan membantu membongkar jaringan korupsi di Honduras.
2. MACCIH memperkuat kapasitas teknis institusi seperti Kantor Kejaksaan, Dewan Yudisial, polisi Urusan Internal Direktorat Kementerian Keamanan, Pengadilan Inspektur Jenderal, dan lembaga-lembaga publik yang relevan lainnya.
3. MACCIH bertujuan untuk memastikan bahwa kasus korupsi yang diselidiki dengan benar dan memiliki bukti yang kuat untuk membawa pelaku ke pengadilan. (oas.org, 2018)

Upaya MACCIH dalam Menangani Korupsi dan Impunitas di Honduras

MACCIH didirikan untuk melakukan pendekatan komprehensif dalam memerangi korupsi dan impunitas di Honduras. Pendekatan komprehensif dilakukan dengan cara memperkuat sistem kelembagaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat sipil. MACCIH bekerjasama dengan masyarakat sipil untuk mengembangkan instrumen pengawasan warga negara terhadap sistem peradilan pidana dan berupaya menciptakan forum untuk pertanggungjawaban melalui sistem desentralisasi dari sistem pemantauan peradilan pidana.

Upaya MACCIH dilakukan melalui empat bidang divisi yang saling melengkapi. Keempat divisi tersebut adalah:

1. Divisi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan impunitas;
2. Divisi reformasi sistem peradilan pidana;
3. Divisi reformasi politik dan pemilu; dan
4. Divisi keamanan publik.

Divisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Impunitas

Dibentuknya Divisi ini bertujuan untuk mengganti sistem peradilan pidana yang ada di Honduras. Oleh karenanya divisi ini melibatkan lembaga-lembaga terkait dalam bekerjasama dan memberikan kontribusinya untuk pemberantasan korupsi Honduras.

Memberikan Dukungan dan Melakukan Kerjasama Aktif dengan Kantor Kejaksaan Agung

Dukungan aktif MACCIH terhadap kantor Kejaksaan Agung berupa:

1. Meningkatkan kerangka kerja kelembagaan Honduras
2. Melakukan investigasi bersama
3. Memberikan bantuan teknis
4. Membuat kelompok khusus penuntut anti-korupsi
5. Mengembangkan teknik investigasi dalam kasus yang lebih besar atau kompleks
6. Membuat kinerja jaksa, analisis dan penyelidik yang lebih baik

Melakukan Kerjasama Aktif dengan Kantor Inspektur Jenderal Republik (*Procuraduría General de la Nación/PGR*)

MACCIH-OAS kemudian mulai bekerjasama dengan PGR untuk membangun kapasitas kelembagaan anti-korupsi, dan akan memberikan dukungan berkelanjutan untuk tugas-tugas berikut:

1. Menentukan kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi terhadap Negara dan konsekuensinya terhadap ganti rugi. dicari oleh PGR dalam persidangan;
2. Kebijakan bantuan internasional timbal balik untuk pengembalian aset yang dihasilkan dari korupsi;
3. Alat yang akan digunakan untuk memastikan pemulihan kerusakan sipil yang efektif dari mereka yang dihukum karena kejahatan terhadap administrasi publik;
4. Investigasi yang dilakukan oleh Kantor Kejaksaan Agung dan pelaporan kejahatan.

Membentuk Unit Penuntutan Khusus untuk Memerangi Impunitas Terkait Korupsi (*Unidad Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción/UFECIC*)

Unit Penuntutan Khusus untuk Memerangi Impunitas Terkait Korupsi (UFECIC) adalah unit baru dari Kantor Kejaksaan Agung yang dibentuk untuk menyelidiki kasus-kasus korupsi yang kompleks atau yang melibatkan partisipasi jaringan masyarakat dan pribadi. UFECIC dipromosikan oleh MACCIH-OAS dan dibentuk oleh Kantor Kejaksaan Agung pada Januari 2017, sebagai hasil dari kesepakatan yang ditandatangani antara Jaksa Agung Óscar Fernando Chinchilla dan Sekretaris Jenderal OAS, Luis Almagro.

Berkantor pusat di Tegucigapala dan San Pedro Paila, UFECIC terdiri dari 41 ahli profesional termasuk jaksa penuntut, agen investigasi, dan berbagai spesialis yang ahli dari berbagai bidang. UFECIC juga membentuk Tim Investigasi dan Penuntutan Kriminal Terintegrasi di mana jaksa dan staf dari Kantor Kejaksaan Agung bekerja bersama dengan jaksa penuntut internasional dan para ahli lainnya dari MACCIH-OAS. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas Kantor Kejaksaan Agung dalam investigasi yang kompleks untuk memperkuat institusi dan lebih efektif menuntut kejahatan korupsi. Mekanisme unit khusus ini yang akan bekerja dengan dukungan dan bekerjasama secara teknis dengan MACCIH.

Kerjasama dengan Dewan Anti-Korupsi Nasional (*CNA, Consejo Nacional Anticorrupcion*)

Sebagaimana disebutkan dalam bagian 3.1.3.6 dari Perjanjian, dalam enam bulan pertama MACCIH-OAS telah mencari mekanisme untuk kerjasama aktif dengan CNA, sebagai pengakuan atas peran aktif MACCIH. Mekanisme dibuat untuk melakukan investigasi awal kasus-kasus korupsi, serta dalam menyajikan pengaduan yang diterima oleh Kantor Kejaksaan Agung agar investigasi yang dilaporkan telah diselidiki.

CNA dibuat melalui Keputusan No. 7-2005 yang menetapkan bahwa badan tertinggi Majelis Umum terdiri dari perwakilan 12 organisasi masyarakat sipil. Diantara tanggung jawab CNA adalah memberantas dan mencegah korupsi dengan menuntut penuntutan dan memberikan informasi dan dukungan untuk menghasilkan bukti yang dapat digunakan oleh jaksa penuntut. Untuk itu, ia dapat bertindak atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan Kantor Kejaksaan Agung atau dari setiap kepala cabang, orang atau badan Negara. CNA dibiayai setiap tahun sebagai item dalam anggaran nasional. Namun, ia juga dapat secara mandiri mendapatkan dana tambahan untuk operasinya.

MACCIH menganggap bahwa koordinasi upaya anti-korupsi yang dilakukan oleh berbagai lembaga harus ditingkatkan. Honduras akan lebih kuat jika kapasitas yang ada disatukan untuk aksi strategis.

Selain bekerjasama dengan berbagai lembaga, Divisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Impunitas bersama dengan MACCIH juga mempromosikan pembentukan yurisdiksi kriminal khusus untuk korupsi. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjutnya.

Pembuatan Yurisdiksi anti-korupsi nasional

Pada 22 Februari saat presentasi di Honduras, MACCIH mengusulkan pembuatan yurisdiksi anti-korupsi nasional. Hal ini dilakukan berdasarkan keberhasilan negara lain dalam memerangi korupsi di seluruh dunia dimana harus ada sistem khusus dengan yurisdiksi atas seluruh negara yang bekerja untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus korupsi.

Tujuan yurisdiksi khusus ini adalah untuk memberikan keadilan khusus terkait penuntutan kasus-kasus korupsi yang kompleks, menjadikan Honduras negara kedua di Amerika Latin dengan yurisdiksi khusus di bidang korupsi. Yurisdiksi khusus memiliki mitra strategisnya di Kantor Kejaksaan Agung. Pada 18 Januari 2017, Sekretaris Jenderal menandatangani “Mekanisme Antar Lembaga untuk Kerjasama Bilateral antara Kantor Kejaksaan Agung Republik Honduras dan Sekretariat Jenderal Organisasi Negara-negara Amerika melalui Misi untuk Mendukung perang melawan Korupsi dan Impunitas di Honduras. Tujuannya adalah untuk mengembangkan mekanisme kerjasama yang memungkinkan proses kerja bersama dan terkoordinasi yang efektif antara MACCIH dan Kantor Kejaksaan Agung, dengan melanjutkan penyelidikan yang tidak memihak, penuntutan, pengejaran keadilan, dan hukuman bagi mereka yang bertanggung jawab karena melakukan kejahatan korupsi.

Divisi Reformasi Sistem Peradilan Pidana

Divisi ini bekerja untuk melakukan perubahan pada masalah-masalah peradilan pidana, berusaha untuk membuat penuntutan pidana efektif, mengurangi tumpukan kasus peradilan, mengkonsolidasikan independensi hakim, meningkatkan praktik peradilan, dan membangun kebijakan kriminal yang jelas, antara lain tindakan.

Reformasi Sistem Peradilan Pidana

Partisipasi CEJA untuk reformasi peradilan pidana

Pusat Studi Keadilan Amerika (*Centro de Justicia de las Américas*, CEJA) tiba di Honduras pada tanggal 21 September. Pada paragraf 4.1 dalam perjanjian MACCIH-OAS menetapkan bahwa Divisi Reformasi Sistem Peradilan Pidana, para ahli CEJA akan melakukan tinjauan dan analisis studi serta investigasi yang pada lembaga-lembaga sistem peradilan pidana di Honduras, dengan penekanan khusus pada evaluasi dan hasil dari reformasi ini.

CEJA juga akan membantu dalam mengembangkan diagnosis status sistem peradilan pidana, menganalisis perilaku dan hasilnya, serta aspek-aspek spesifik dari masing-masing lembaga dalam sistem, seperti sistem tata kelola, lokasi kelembagaan, tingkat otonomi, kemampuan untuk melakukan mandat institusional, prosedur kerja internal, dan model organisasi internal.

CEJA melakukan kolaborasi dalam mengembangkan serangkaian rekomendasi dengan cakupan yang beragam untuk memperkuat kualitas, efektivitas, dan legitimasi sistem peradilan pidana Honduras. Seperti contohnya melakukan analisis dan evaluasi sistem peradilan pidana Honduras akan mengembangkan pendekatan inovatif dalam reformasi peradilan.

Memperbaiki Kinerja Hakim

Honduras memiliki masalah yang terkait dengan posisi hakim di cabang yudisial, dimana sebagian besar dari mereka diisi oleh hakim secara sementara. Ini jelas berdampak pada stabilitas posisi yang dipegang oleh petugas sistem peradilan dan berakibat pada independensi mereka.

Ketua Mahkamah Agung berkomitmen untuk meningkatkan aturan pada kompetisi ini dalam arti mengamati prinsip-prinsip dasar dari penunjukan dan memahami bahwa ini bukan hanya satu kompetisi untuk 190 posisi. Kemudian, perlu juga ditetapkan dengan jelas bahwa hakim atau hakim yang dipilih harus setidaknya di antara kandidat pertama dengan peringkat tertinggi dalam kompetisi, atau khususnya orang yang memenangkan tempat pertama. Dalam hal ini, penting untuk mengatur dengan jelas situasi ini untuk membatasi penunjukan diskresioner kandidat yang paling terlatih dan berjasa.

Melakukan perjanjian dengan Mahkamah Agung Chili

Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk menetapkan garis prinsip dan mekanisme kerjasama antar lembaga dengan Mahkamah Agung Republik Chili dan Mahkamah Agung Republik Honduras. Dalam rangka memperkuat dan meningkatkan kualitas dan manajemen sistem masing-masing untuk mengelola keadilan, berkontribusi pada pencapaian tujuan kelembagaan, membangun ruang lingkup tindakan untuk desain inisiatif koperasi dan tindakan dalam konteks kesetaraan dan promosi berbagi informasi dalam masalah peradilan.

Kedua pengadilan telah menunjuk MACCIH-OAS ke Proyek Serikat untuk Keadilan USAID, sebagai fasilitator kegiatan transfer dan kolaborasi yang telah mereka lakukan, yang secara teori akan memastikan sumber daya yang dibutuhkan untuk kerja sama yang efektif di area yang ditunjukkan.

Melakukan Observasi Sistem Peradilan Pidana Honduras

Bagian 4.1 dari Perjanjian telah ditetapkan bahwa MACCIH-OAS berkontribusi dalam reformasi sistem peradilan pidana Honduras. Selama periode ini, MACCIH berfokus pada kunjungan ke luar ibukota untuk terlibat dalam dialog dengan berbagai aktor sosial, politik, dan ekonomi di Choluteca, La Paz, Intibuca, Comayagua, Atlántida, Colón, Catacamas, Olancho, Gracias a Dios, Danlí-El Paraíso, La Ceiba, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, dan Copán Ruinas.

Berbagai pertemuan tersebut juga digunakan untuk mengumpulkan informasi dan sumber daya untuk mendukung instrumen observasi MACCIH-OAS. Selain itu, pertemuan-pertemuan ini berfungsi untuk membangun saluran komunikasi untuk mendapatkan informasi tentang dinamika korupsi dan tingkat impunitas di berbagai wilayah negara. Ini akan memungkinkan MACCIH untuk mendesentralisasi Observatorium.

Memperbaiki dan Memonitor Sistem Peradilan Pidana.

Upaya ini mencakup cara-cara yang dilakukan oleh organisasi berbeda sehingga sistem peradilan dapat dievaluasi secara berkala. MACCIH berharap upaya ini mampu mendorong perubahan dan meningkatkan layanan bagi publik, serta memperkuat independensi peradilan dengan mengurangi impunitas di negara tersebut. Untuk tujuan ini, tim Observatory telah maju dalam pengembangan dan pelaksanaan metodologi yang meliputi:

- Metode kuantitatif dan kualitatif: Ini termasuk wawancara, observasi di tempat, survei, dan panel para ahli. Metode kuantitatif memungkinkan Observatory untuk memperoleh data objektif dari saat Misi dibuat untuk kemajuan atau kemunduran apa pun yang mungkin muncul selama atau setelah mandatnya. Metode kualitatif meneliti data subjektif yang terkait dengan persepsi warga tentang komponen sistem peradilan pidana.
- Tinjauan dokumen: Memprioritaskan analisis sumber data yang ada untuk mencegah duplikasi upaya.
- Analisis komparatif: Ini berfungsi untuk menilai status sistem peradilan pidana Honduras di wilayah tersebut dan memeriksanya berdasarkan standar internasional yang ada.

Membuat Forum-Forum Dialog

Upaya Observatory dalam pekerjaannya yang kedua yaitu melakukan diskusi melalui forum-forum dialog. Forum-forum ini bertujuan untuk mengumpulkan rekomendasi, saran, dan dukungan dari masyarakat sipil dan para pakar lokal mengenai topik-topik yang MACCIH-OAS sedang usulkan untuk mengajukan reformasi guna memperkuat perang melawan korupsi dan impunitas di Honduras.

Menginformasikan dan Meningkatkan Kesadaran di Kalangan Masyarakat Sipil Honduras

Observatory telah bekerja membangun sebuah situs web di mana ia akan memposting struktur, metodologi, basis data masyarakat sipil, dan matriks penilaian (indikator yang diusulkan), bersama dengan informasi terkait lainnya. Situs ini diharapkan akan diluncurkan pada Mei 2017 dan juga akan menyediakan saluran virtual untuk memberi tahu masyarakat sipil tentang kegiatannya dan hasil pekerjaannya.

Bagian yang akan memantau kasus-kasus korupsi di mana MACCIH-OAS secara aktif berkolaborasi sedang dipertimbangkan untuk situs web. Kriteria evaluasi yang diusulkan untuk ini akan mencakup spesifik tentang status kasus, proses perkara, pejabat pemerintah yang terlibat, hasil, pembatasan, dan risiko, serta apakah reformasi yang diusulkan oleh Misi untuk sistem peradilan pidana telah atau tidak diadopsi.

Divisi Reformasi Politik dan Pemilu

Tujuan divisi ini dibentuk adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang adil dan transparan mengenai pembiayaan politik dan pemilu. Kemudian divisi ini juga memiliki tugas khusus dalam menyediakan konsultasi penyusunan undang-undang keuangan partai politik berdasarkan standar internasional.

Undang-undang tentang Pembiayaan, Transparansi, dan Pengawasan Partai Politik

Negara memiliki kewajiban untuk mengatur masalah partai politik, pergerakan, dan pendanaan kandidat untuk pembiayaan pemilu dan proses pengawasannya. Oleh karenanya, Honduras telah mengatur hal tersebut dan mengesahkan Undang-Undang tentang Pemilihan dan Organisasi Politik tahun 2004 (Keputusan No. 44-2004), yang mencakup bab tentang pembiayaan.

Namun, bagi MACCIH terdapat beberapa aspek pembiayaan yang salah satunya disebut dengan “Utang Politik” yang mana memberi para pihak yang tidak bertanggung jawab sarana untuk menutupi pengeluaran tertentu. MACCIH-OAS kemudian menerima informasi yang menyatakan bahwa dalam hal pengawasan, tidak ada satu orang atau satu pihak pun yang terlibat dalam penyelidikan atau dihukum karena pendanaan yang tidak teratur. Kurangnya informasi mengungkapkan bahwa mekanisme yang ditetapkan tidak efektif. sebagaimana para pemimpin politik sendiri telah mengadukan hal tersebut kepada MACCIH.(Organization of American States. “Installing the Honduran model for combating corruption” Third Semi-Annual Report. Vol-3)

Situasi ini merupakan situasi yang sulit dan memerlukan intervensi dua pihak, yaitu:

1. Undang-undang modern yang menciptakan hukum untuk lebih mengontrol dan mengawasi dana kampanye pemilihan pasrtai dan kandidat.
2. Penegakan praktis undang-undang tersebut

Hal ini diperlukan sehingga undang-undang bukan hanya hukum yang dibutuhkan. Sebaliknya, kontrol yang mencegah korupsi dan kejahatan terorganisir dari kegiatan pihak pembiayaan juga harus secara tegas ditegakkan dalam praktik.

Selama proses penulisan RUU, kampanye yang disebut #NUEVALEYPOLITICALIMPIA atau hukum politik bersih dirancang dengan dukungan mahasiswa di UNITEC University. Tujuan kampanye ini adalah untuk memberi tahu masyarakat sipil dan opini publik tentang manfaat inisiatif ini sebagai alat anti korupsi yang kuat. Acara-acara publik dan pertemuan dengan masyarakat sipil diadakan, para pakar dikerahkan di media, dan kampanye dilakukan melalui jejaring sosial, semuanya untuk menyebarkan berita tentang inisiatif ini.

Dengan demikian, MACCIH berharap bahwa proses ini diakui sebagai inisiatif negara, para pemimpinnya, dan masyarakat sipil untuk membersihkan politik dan memperkuat demokrasi dan sistem partai politik. Dengan demikian dapat mengatasi ancaman seperti perdagangan narkoba, kejahatan terorganisir, dan korupsi yang mempengaruhi Honduras.

Divisi Keamanan Publik

Divisi ini dirancang untuk membantu meningkatkan kinerja keamanan publik yaitu:

- 1.Polisi Nasional
- 2.Kantor Kejaksaan Agung
- 3.Cabang Yudisial
- 4.Fasilitas Kemasyarakatan.

Namun divisi ini akan memfokuskan kinerjanya pada sektor kepolisian. Pekerjaan MACCIH-OAS akan melengkapi upaya yang selama ini dilakukan oleh Departemen Keamanan Publik OAS. Sehingga, Departemen Keamanan Publik OAS, Jaringan Antar-Amerika untuk Pengembangan Polisi dan Profesionalisasi akan memberikan dukungan di seluruh proses ini, seperti juga platform lain yang disediakan Organisasi untuk negara tersebut.

Tanggung jawab Divisi Keamanan Publik ditetapkan dalam kerangka kerja perjanjian OAS-MACCIH. Tanggung jawab ini termasuk menindaklanjuti rekomendasi yang dibuat oleh Sekretariat Jenderal Organisasi Negara-negara Amerika sehubungan dengan Sistem Keamanan Warga Nasional [Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana] (SNSC), yang mencakup empat tindakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan

perencanaan dan manajemen strategi; mendigitalkan, menggabungkan, memastikan interoperabilitas informasi; mendukung proses reformasi Kepolisian Nasional Honduras yang sedang berlangsung; dan memperkuat sistem peradilan pidana. Aspek lain yang akan dikembangkan oleh Divisi Keamanan Publik mengacu pada organisasi Unit untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia, Jurnalis, Komentator Sosial, dan Pekerja Kehakiman, termasuk dalam apa yang disebut "Undang-undang Perlindungan," untuk melindungi mereka yang berkontribusi pada penuntutan pidana dan administratif atas kasus korupsi dan jaringan korupsi, serta atas nama memperkuat sistem peradilan pidana.

Tanggung jawab Divisi Keamanan Publik termasuk berkolaborasi untuk mempromosikan penegakan efektif UU Perlindungan untuk membantu melindungi semua subjek hukum yang dicakup oleh hukum yang dirujuk. Divisi Keamanan Publik juga bertanggung jawab untuk membantu mempromosikan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang diakui dalam instrumen hukum internasional atas nama mereka yang membela dan mempromosikan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan tugas-tugas yurisdiksi.

Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa divisi ini adalah satu-satunya di dalam organisasi MACCIH dengan tanggung jawab di bidang hak asasi manusia. Untuk mencapai tujuannya, Divisi Keamanan Publik telah memfasilitasi pertemuan praktik yang baik tentang UU Perlindungan untuk mengembangkan strategi dan menciptakan mekanisme perlindungan yang dijamin di dalamnya.

Dalam melakukannya, Divisi Keamanan Publik membangun hubungan dekat dan telah bekerjasama dengan semua lembaga publik dan swasta terkait dengan isu mekanisme perlindungan, seperti Perlindungan Direktorat Nasional, Kantor Under-Sekretaris Negara di Kantor Hak Manusia, Keadilan, Desentralisasi, dan Pemerintahan; Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Kantor Kejaksaan Agung dan cabang yudisial, dan berbagai LSM yang bekerja sehari-hari atas nama pembelaan dan pemajuan hak asasi manusia dan mereka yang bertindak dalam bidang keadilan di negara, seperti COSUDE, CIPRODEH, CEDOH, dan UNAH-IUDPAS, dan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang mana menghasilkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan MACCIH (*The Mission to Support The Fight Against Corruption and Impunity in Honduras*) dalam menangani korupsi dan impunitas di Honduras adalah:

Melalui Divisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Impunitas:

1. Memberikan dukungan dan melakukan kerjasama aktif dengan kantor kejaksaan agung;
2. Pembuatan yurisdiksi anti-korupsi nasional;
3. Pembentukan Unit Penuntutan Khusus untuk Memerangi Impunitas Terkait Korupsi (*Unidad Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción/UFECIC*);
4. Kerjasama Aktif dengan Kantor Inspektur Jenderal Republik (*Procuraduría General de la Nación/PGR*);
5. Pembentukan Dewan Anti-Korupsi Nasional (*Consejo Nacional Anticorrupcion/CNA*)

Melalui Divisi Reformasi Sistem Peradilan Pidana

1. Partisipasi CEJA (Centro de Justicia de las Américas) dalam reformasi sistem peradilan pidana;
2. Memperbaiki kinerja hakim
3. Melakukan perjanjian dengan Mahkamah Agung Chili;
4. Melakukan observasi sistem peradilan pidana Honduras;
5. Memperbaiki dan memonitor sistem peradilan pidana;
6. Membuat forum-forum dialog;
7. Menginformasikan dan meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat sipil Honduras.

Melalui Divisi Reformasi Politik dan Pemilu:

1. Membuat undang-undang tentang pembiayaan, transparansi, dan pengawasan partai politik.

Melalui Divisi Keamanan Publik:

Meningkatkan kinerja keamanan publik yaitu:

1. Polisi Nasional;
2. Kantor Kejaksaan Agung;
3. Cabang Yudisial;
4. Fasilitas Kemasyarakatan.

B. Saran

Mengingat bahwa Honduras merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi dan impunitas yang tinggi maka dalam hal ini dibutuhkan beberapa pihak eksternal dalam mengatasinya. Tidak hanya pihak eksternal, masyarakat sipil juga diminta berkontribusi secara total dalam upaya pemberantasan korupsi dan impunitas ini.

Langkah pemerintah Honduras dalam meminta bantuan OAS untuk menangani masalah di dalam negerinya sudah tergolong benar karena MACCIH terbukti dapat mengatasi beberapa akar masalah yang berada di Honduras. Namun, tingkat partisipasi masyarakat sipil yang rendah dan cenderung abai secara tidak langsung mempengaruhi hasil dari kinerja MACCIH itu sendiri. Maka dalam hal ini diharapkan kesediaan dan kesadaran masyarakat sipil dalam berpartisipasi lebih besar lagi untuk benar-benar menghilangkan budaya korupsi dan impunitas di Honduras. Berangkat dari pengalaman MACCIH yang menunjukkan kecenderungan positif terkait upayanya dalam mengatasi korupsi dan impunitas di Honduras yang mana digambarkan dalam penelitian ini maka diperlukan lebih banyak lagi penelitian-penelitian sejenis yang bisa menawarkan pola, bentuk, cara pandang, maupun metode yang ditujukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai kasus-kasus korupsi di belahan dunia lainnya.

Referensi

- “Fact & Sheet: What’s MACCIH?” terdapat di <http://www.oas.org/en/spa/dsdsm/maccih/new/mision.asp#faq> diakses pada 11 Desember 2018
- “Honduras Profile” terdapat di Insight Crime.. <https://www.insightcrime.org/honduras-organized-crime-news/honduras/> diakses pada 02 Desember 2018
- Mulyadi, Lilik. 2013. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Cetakan II
- Rudy, Teuku May. 2005. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: Refika Aditama
- Suryokusumo, Sumaryo. 1987. *Organisasi Internasional*. Jakarta: UI Press
- MACCIH, OAS. *First Semiannual Report*. 2016